



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU TRIWULAN IV



**KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2021**

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL KANTOR
KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2021**

A. Latar Belakang

Monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan apabila hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Dengan kata lain pemantauan merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Evaluasi menurut OECD merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi merupakan sebuah penilaian yang seobyektif dan sesistematis mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan. Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu kegiatan, program, kebijakan, organisasi, sektor, tematik, dan bantuan negara dan lain-lainnya.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Di dalam sebuah organisasi, sudah selayaknya program yang berjalan disesuaikan dengan visi dan misi organisasi. Secara sederhana, visi dikenal sebagai mimpi organisasi yang hendak diwujudkan bersama, sedangkan misi sebagai tujuan jangka panjang yang memuat sejumlah kompetensi. Visi dan misi menjadi serangkaian kebijakan mutu mengenai ukuran/standar yang hendak ditetapkan oleh organisasi.

Kita telah mengetahui sebelumnya bahwa untuk mencapai visi dan misi organisasi perlu dilaksanakan serangkaian aktivitas hingga menghasilkan *impact*/hasil yang diharapkan. Namun, hal yang tidak kalah pentingnya untuk dilakukan setelah aktivitas terlaksana adalah menerapkan monitoring dan evaluasi sebagai salah satu bagian dari manajemen program yang wajib dilakukan.

Pengawasan (monitoring) dan evaluasi dilakukan sebagai upaya penjaminan mutu terhadap program kerja yang dilakukan oleh organisasi secara berkesinambungan dan bukan merupakan kegiatan yang bersifat *Ad Hoc* (untuk satu tujuan tertentu saja). Proses monitoring dan evaluasi memberikan penekanan bahwa kegiatan ini bukan kegiatan untuk mencari kesalahan dalam pelaksanaan program organisasi, melainkan upaya untuk melakukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan.

Monitoring dilakukan berbasis pada data atau fakta yang ada, berpedoman pada proses/aktivitas kerja pada tiap divisi/unit serta berfokus pada pencapaian rencana kerja. Sedangkan evaluasi bisa dilakukan apabila hasil monitoring telah didapatkan. Kunci utama dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) adalah mendapatkan dan menganalisa kemajuan, pelaksanaan rencana kerja, serta mengidentifikasi masalah, dan melakukan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Seperti halnya dengan pengendalian internal, monitoring dan evaluasi juga dapat dilakukan oleh tim yang berdiri sendiri dalam satu organisasi yang sama yang dikenal dengan monitoring dan evaluasi internal (MONEVIN). Memang pelaksanaan MONEVIN belum terlalu familiar bagi kebanyakan organisasi, mengingat biasanya organisasi cenderung memperdayakan pihak luar untuk melakukan proses auditing. Sesuai dengan namanya, monitoring dan evaluasi internal dilakukan oleh pihak yang menjadi bagian dari organisasi tersebut. Namun, untuk menjadi pelaksana MONEVIN, seseorang harus memenuhi persyaratan minimal yang wajib dipenuhi, seperti bebas dari berbagai unsur kepentingan dalam program, memiliki sikap yang jujur, egaliter, tidak memihak, dan bukan bagian personil bagian dari tim yang akan diaudit divisinya.

Monitoring dan evaluasi (monev) tidak hanya membutuhkan pemahaman tentang persiapan, perencanaan, pelaksanaan program saja namun juga mengenai pelaporan hasil evaluasi program. Hasil monev merupakan informasi berharga yang dapat dijadikan pedoman bagi pimpinan atau pemangku kebijakan untuk mengambil kebijakan bagi organisasi. Seseorang dengan kemampuan menyusun instrumen, mengumpulkan data, menganalisis data hingga menginterpretasikan hasil analisis sangat diperlukan sehingga diperoleh kesimpulan yang berupa hasil analisis. Hasil analisis data monev ini menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan perencanaan program di masa mendatang.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal (Monev Internal) diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penjaminan mutu kegiatan organisasi. Monev Internal dilakukan sebagai konsistensi penjaminan mutu dimana kegiatannya dapat terus dipantau secara berkelanjutan. Ketika kegiatan MONEVIN akan dilakukan, ada baiknya menentukan ruang lingkup dari Monev Internal itu sendiri. Ruang lingkup yang dimaksud misalnya adalah jenis kegiatan program (pelayanan masyarakat), fungsi dan tugas para staf, dan manfaat yang nantinya akan dicapai.

Tentu saja, dalam pelaksanaan Monev Internal ini juga membutuhkan sumber daya yang kompeten, jumlah anggota tim yang memadai, keahlian tim, hingga periode pelaksanaan Monev Internal. Kegiatan Monev Internal biasanya dilakukan secara sampling artinya tidak keseluruhan data diperiksa dan evaluasi. Namun, apabila jangka waktu memungkinkan, maka pemeriksaan yang bersifat sensus mungkin untuk dilakukan.

Langkah pertama yang dilakukan Monev Internal adalah dengan melakukan tinjauan yang dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) langkah dasar, yaitu:

1. Meninjau sistem dengan memberikan pertanyaan. Misalnya apakah semua staf memahami kebijakan mutu yang telah ditetapkan oleh organisasi, bagaimana sistem manajemen direncanakan dan apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan, dan sebagainya.
2. Meninjau melalui dokumentasi prosedur atau aktivitas kerja untuk memastikan apakah prosedur kerja tersebut mudah dipahami oleh staf program.
3. Membandingkan proses dengan standar yang berlaku, lingkup MONEVIN yang telah disepakati, kebijakan mutu organisasi, dan memeriksa prosedur kerja dan laporan kegiatan di lapangan.
4. Mencatat temuan/ketidaksesuaian yaitu apabila tidak ditemukannya rencana kerja, dokumen yang diperlukan hilang atau kurang, ataupun ditemukan ketidaksesuaian lainnya yang memerlukan perbaikan sesegera

Setelah empat langkah dasar ini dilakukan, maka Monev Internal siap untuk diimplementasikan. Kegiatan Monev Internal juga dapat dilakukan secara bertahap dalam tiap-tiap periode, misalnya pada periode Monev Internal tahun pertama dilakukan pemeriksaan proses dan kepatuhan terhadap prosedur program yang dijalankan. Kemudian pada periode

berikutnya kegiatan Monev Internal dilanjutkan dengan pemeriksaan pada capaian indikator kerja dan *review* terhadap pekerjaan yang telah dilakukan.

B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal (MONEVIN) di Lingkungan Kantor Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 44 Tahun 2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 Nomor 48); dan

C. Maksud dan Tujuan

Secara umum proses Monev Internal dilakukan dalam beberapa tahapan, mulai dari sebelum MONEVIN atau dikenal dengan Pre-Monev Internal, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan penetapan kebutuhan MONEVIN seperti kelengkapan dokumen atau temuan/data dari kegiatan MONEVIN sebelumnya serta pemeriksaan struktur organisasi dan denah atau lokasi unit program. Selanjutnya, pemeriksaan dari tahap PRE-MONEVIN dimulai dengan mengajukan pertanyaan terkait dokumen yang telah diverifikasi kepada staf terkait. Kemudian hasilnya akan diimplementasikan dengan prosedur dan hasil kerja di lapangan.

Apabila dari hasil Monev Internal ini terjadi ketidaksesuaian, maka tim Monev Internal akan membantu memberikan rekomendasi untuk tindakan perbaikan sebelum nantinya evaluasi mulai diberlakukan. Kegiatan ini bersifat berulang yang terus dilakukan hingga hasil kerja organisasi dinyatakan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai. Pelaksanaan MONEVIN tentu saja akan sangat bermanfaat apabila dapat

diaplikasikan pada program organisasi. Mengingat kesalahan program dapat terjadi kapan saja, Monev Internal dapat membantu pelaksanaan perbaikan sehingga kesalahan dapat diminimalisir pada periode-periode berikutnya. Tujuan utama dari pelaksanaan Monev Internal diantaranya:

1. Menjamin adanya kesesuaian dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan organisasi sesuai dengan standar yang berlaku;
2. Melihat efektifitas dari tindakan perbaikan (Monev) yang telah dilakukan pada periode sebelumnya;
3. Melakukan pemeriksaan catatan untuk mengevaluasi apabila terdapat kecenderungan data; dan
4. Melakukan evaluasi terhadap aktivitas program organisasi termasuk pencapaiannya.

Pemantauan bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya. Sedangkan maksud dari pemantauan adalah untuk:

1. Mendapatkan informasi perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan yang berkelanjutan mengenai pencapaian indikator kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan;
2. Melakukan identifikasi masalah agar tindakan korektif dapat dilakukan sedini mungkin; dan
3. Mendukung upaya penyempurnaan perencanaan berikutnya melalui hasil pemantauan.

Pelaksana pemantauan untuk sebuah perangkat daerah adalah masing-masing Pengelola Kegiatan/Instansi di daerah serta komponen pembina/penanggung jawab kegiatan pusat, yang hasilnya menjadi *input* bagi perumusan kebijakan selanjutnya.

Lingkup pemantauan terdiri dari seluruh aspek yang berkaitan dengan program/kegiatan baik aspek perencanaan, aspek penyaluran/pencairan dana, aspek pelaksanaan maupun aspek pelaporan. Bentuk pemantauan dapat melalui Rapat Berkala, Rapat *Ad Hoc*, Pelaporan maupun kunjungan lapangan, obyek pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana kerja, dengan fokus pelaksanaan program dan kegiatan dan bentuk produk (akhir) pemantauan adalah laporan. Komponen pemantauan meliputi perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (*output*) dan kendala yang dihadapi dan tindak lanjut.

Sedangkan Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan *output*

pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan *output* pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk:

1. Memberikan kesimpulan dalam bentuk umpan balik sehingga dapat terus mengarahkan pencapaian visi/misi/sasaran yang telah ditetapkan;
2. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara yang terjadi dengan yang direncanakan, serta mengaitkannya dengan kondisi lingkungan yang ada; dan
3. Arah evaluasi bukan pada apakah informasi yang disediakan benar atau salah, tetapi lebih diarahkan pada perbaikan yang diperlukan atas implementasi kebijakan/program/kegiatan.

Adapun informasi yang diberikan atas pelaksanaan evaluasi internal yang dilakukan oleh instansi, antara lain:

1. Benar atau tidaknya strategi yang digunakan;
2. Ketepatan cara operasi yang dipilih;
3. Pemilihan cara pembelajaran yang lebih baik;
4. Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan rutin sedang berjalan dan internal, serta pengawasan dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran/hasil dan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja program; dan
5. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berkala, dapat bersifat internal dan eksternal atau partisipatif, sebagai umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama.

D. Pagu Anggaran

Alokasi Anggaran belanja Daerah Tahun 2021 pada Kantor Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp. 2.288.564.763(Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) dengan program/kegiatan sebagai berikut.

Tabel 1 Pagu Anggaran Kantor Kecamatan Batang Lupar Kabupaten
Kapuas Hulu Tahun 2021

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN
1	2	3
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.100.119.063
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.410.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.160.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.160.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.090.000
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.891.624.963
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.769.149.963
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	121.380.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.095.000
7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.095.000
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.095.000
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.524.800
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.772.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.365.800
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.400.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.584.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	38.444.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.959.000
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.379.300
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.379.300
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.180.000

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN
1	2	3
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.520.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.860.000
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.905.000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.905.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.050.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39.050.000
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	39.050.000
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.977.200
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.977.200
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.977.200
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	77.200.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	77.200.000
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	77.200.000
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	62.218.500
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	62.218.500
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	62.218.500
	JUMLAH	2.288.564.763

E. Sasaran dan Capaian Kinerja

Sasaran dan capaian kinerja pada Kantor Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu terbagi dalam 4 (empat) seksi dan 2 (dua) Subbagian, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Subbagian Umum dan Aparatur serta Subbagian Program dan Keuangan.

1. Sasaran dan Capaian Kinerja Seksi Pemerintahan

Tabel 2 Sasaran dan Capaian Kinerja Triwulan IV

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Triwulan IV				
			Target (%)		Realisasi (%)		Persentase Realisasi (RFK 0) TW IV
			Kuant	Persen	Kuant	Persen	
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							100%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan		4 Laporan	100%	4 Laporan	100%	100%

2. Sasaran dan Capaian Kinerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Triwulan IV				
			Target (%)		Realisasi (%)		Persentase Realisasi (RFK 0) TW IV
			Kuant	Persen	Kuant	Persen	
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							100%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan		30%	30%	30%	30%	100%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Triwulan IV				
			Target (%)		Realisasi (%)		Persentase Realisasi (RFK 0) TW IV
			Kuant	Persen	Kuant	Persen	
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							96,62%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pengurus PKK yang aktif		100%	100%	100%	100%	96,62%

3. Sasaran dan Capaian Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Triwulan IV				
			Target (%)		Realisasi (%)		Persentase Realisasi (RFK 0) TW IV
			Kuant	Persen	Kuant	Persen	
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kegiatan Pembinaan Kerukunan antar Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		4 Laporan	100%	4 Laporan	100%	100%

4. Sasaran dan Capaian Kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Triwulan IV				
			Target (%)		Realisasi (%)		Persentase Realisasi (RFK 0) TW IV
			Kuant	Persen	Kuant	Persen	
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umu, dan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Batang Lupar		4 Laporan	100%	4 Laporan	100%	100%

5. Sasaran dan Capaian Kinerja Subbagian Umum dan Aparatur

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Triwulan IV				
			Target (%)		Realisasi (%)		Persentase Realisasi (RFK 0) TW IV
			Kuant	Persen	Kuant	Persen	
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							78,98%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Laporan	100%	4 Laporan	100%	95,57%

*Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu
Triwulan IV*

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Triwulan IV				
			Target (%)		Realisasi (%)		Persentase Realisasi (RFK 0) TW IV
			Kuant	Persen	Kuant	Persen	
1	2	3	4	5	6	7	8
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		2 Laporan	100%	2 Laporan	100%	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		5 Laporan	100%	5 Laporan	100%	0%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6 Unit	100%	4 Unit	66.67%	85,55%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Unit	100%	12 Unit	100%	92,81%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		5 Laporan	100%	5 Laporan	100%	100%

6. Sasaran dan Capaian Kinerja Subbagian Program dan Keuangan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Triwulan IV				
			Target (%)		Realisasi (%)		Persentase Realisasi (RFK 0) TW IV
			Kuant	Persen	Kuant	Persen	
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							94,32%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7 Dokumen	100%	7 Dokumen	100%	91,20%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan		2 Dokumen	100%	2 Dokumen	100%	97,44%

F. Realisasi Anggaran

Anggaran belanja daerah tahun 2021 pada Kantor Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp. **2.288.564.763** dengan realisasi sampai dengan akhir Triwulan IV sebesar Rp.**2.229.031.635** atau 97,40%. Dengan demikian jumlah anggaran belanja yang belum diserap sebesar Rp. **59.533.128** atau 2.6 % dengan rincian sebagai berikut.

1. Realisasi Anggaran Seksi Pemerintahan

Tabel 3 Realisasi Anggaran Triwulan IV

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Rp	%	
1	2	4	5	6	7
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.050.000	39.050.000	100	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39.050.000	39.050.000	100	-

KODE	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Rp	%	
1	2	4	5	6	7
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	39.050.000	39.050.000	100	-

2. Realisasi Anggaran Seksi Perekonomian dan Pembangunan

KODE	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Rp	%	
1	2	4	5	6	7
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.977.200	9.977.200	100%	-
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.977.200	9.977.200	100%	-
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.977.200	9.977.200	100%	-
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	62.218.500	60.118.500	96,62%	2.100.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	62.218.500	60.118.500	96,62%	2.100.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	62.218.500	60.118.500	96,62%	2.100.000

3. Realisasi Anggaran Seksi Kesejahteraan Rakyat

KODE	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Rp	%	
1	2	4	5	6	7
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	68.200.000	68.200.000	100%	-
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	68.200.000	68.200.000	100%	-

KODE	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Rp	%	
1	2	4	5	6	7
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	68.200.000	68.200.000	100%	-

4. Realisasi Anggaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

KODE	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Rp	%	
1	2	4	5	6	7
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.000.000	9.000.000	100%	-
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.000.000	9.000.000	100%	-
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	9.000.000	9.000.000	100%	-

5. Realisasi Anggaran Subbagian Umum dan Aparatur

KODE	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Rp	%	
1	2	4	5	6	7
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	205.084.100	196.424.100	95,77%	8.660.000
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.180.000	49.920.000	95,67%	2.260.000

*Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu
Triwulan IV*

KODE	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Rp	%	
1	2	4	5	6	7
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	1.800.000	100%	-
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.000	3.000.000	100%	-
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.520.000	8.520.000	100%	-
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.860.000	36.600.000	94,18%	2.260.000
7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.095.000	1.095.000	100%	-
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.095.000	1.095.000	100%	-
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.379.300	31.979.300	85,55%	5.400.000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.379.300	31.979.300	85,55%	5.400.000
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.905.000	12.905.000	92,81%	1.000.000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.905.000	12.905.000	100%	-
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000	-	0%	1.000.000

KODE	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Rp	%	
1	2	4	5	6	7
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.524.800	100.524.800	100%	-
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.772.000	2.772.000	100%	-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.365.800	23.365.800	100%	-
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.400.000	2.400.000	100%	-
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.584.000	3.584.000	100%	-
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	38.444.000	38.444.000	100%	-
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.959.000	29.959.000	100%	-

6. Realisasi Anggaran Subbagian Program dan Keuangan

KODE	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Rp	%	
1	2	4	5	6	7
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.895.034.963	1.846.261.835	97,43%	48.773.128
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.410.000	3.110.000	91,20%	300.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.160.000	1.160.000	100%	-
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.160.000	1.010.000	87,07%	150.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.090.000	940.000	86,24%	150.000

KODE	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Rp	%	
1	2	4	5	6	7
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.891.624.963	1.843.151.835	97,44%	48.473.128
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.769.149.963	1.733.066.835	97,96%	36.083.128
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	121.380.000	108.990.000	89,79%	12.390.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.095.000	1.095.000	100%	-

G. Hambatan/Kendala

Hambatan/Kendala pada Kantor Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu terbagi dalam 4 (empat) seksi dan 2 (dua) Subbagian, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Subbagian Umum dan Aparatur serta Subbagian Program dan Keuangan.

1. Hambatan/Kendala Seksi Pemerintahan

Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan dan untuk capaian realisasi kinerjanya sudah tercapai 100%, tidak ada hambatan dan kendala didalam penyelesaian sub kegiatan yg ada dan dari sisi anggaran sudah ada realisasinya, namun progresnya sudah ada dan sudah terlaksana.

2. Hambatan/Kendala Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Kegiatan ini terdiri dari dua sub kegiatan dan untuk capaian realisasi kinerjanya sudah tercapai 100%, tidak ada hambatan dan kendala didalam penyelesaian sub kegiatan yg ada dan dari sisi anggaran sudah ada realisasinya namun terdapat satu sub kegiatan yang hanya terserap sebesar 96,62%, namun progresnya sudah ada dan sudah terlaksana.

3. Hambatan/Kendala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan dan untuk capaian realisasi kinerjanya sudah tercapai 100%, tidak ada hambatan dan kendala didalam penyelesaian sub kegiatan yg ada dan dari sisi anggaran sudah ada realisasinya, namun progresnya sudah ada dan sudah terlaksana.

4. Hambatan/Kendala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan dan untuk capaian realisasi kinerjanya sudah tercapai 100%, tidak ada hambatan dan kendala didalam penyelesaian sub kegiatan yg ada dan dari sisi anggaran sudah ada realisasinya,namun progresnya sudah ada dan sudah terlaksana.

5. Hambatan/Kendala Subbagian Umum dan Aparatur

Kegiatan ini terdiri dari lima belas sub kegiatan dan untuk capaian realisasi kinerjanya sudah tercapai 100%, tidak ada hambatan dan kendala didalam penyelesaian sub kegiatan yg ada dan dari sisi anggaran sudah ada realisasinya namun terdapat tiga sub kegiatan yang tidak terserap 100%, namun progresnya sudah ada dan sudah terlaksana.

6. Hambatan/Kendala Subbagian Program dan Keuangan

Kegiatan ini terdiri dari enam sub kegiatan dan untuk capaian realisasi kinerjanya sudah tercapai 100%, tidak ada hambatan dan kendala didalam penyelesaian sub kegiatan yg ada dan dari sisi anggaran sudah ada realisasinya namun terdapat empat sub kegiatan yang tidak terserap 100%, namun progresnya sudah ada dan sudah terlaksana.

H. Rekomendasi Tindak Lanjut

Rekomendasi Tindak Lanjut pada Kantor Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu terbagi dalam 4 (empat) seksi dan 2 (dua) Subbagian, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Subbagian Umum dan Aparatur serta Subbagian Program dan Keuangan

1. Rekomendasi Tindak Lanjut Seksi Pemerintahan

Tidak ada kendala dan hambatan serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti,artinya dari satu sub kegiatan yg ada bisa diselesaikan sesuai dengan perencanaan dan target yang ditetapkan.

2. Rekomendasi Tindak Lanjut Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Tidak ada kendala dan hambatan serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti,artinya dari satu sub kegiatan yg ada bisa diselesaikan sesuai dengan perencanaan dan target yang ditetapkan namun untuk penyerapan anggaran dapat ditinjau lagi ditahun mendatang agar anggaran yang sudah dianggarkan tersebut dapat terserap 100% sesuai dengan kebutuhan yang ada.

3. Rekomendasi Tindak Lanjut Seksi Kesejahteraan Rakyat

Tidak ada kendala dan hambatan serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, artinya dari satu sub kegiatan yg ada bisa diselesaikan sesuai dengan perencanaan dan target yang ditetapkan.

4. Rekomendasi Tindak Lanjut Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Tidak ada kendala dan hambatan serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, artinya dari satu sub kegiatan yg ada bisa diselesaikan sesuai dengan perencanaan dan target yang ditetapkan.

5. Rekomendasi Tindak Lanjut Subbagian Umum dan Aparatur

Tidak ada kendala dan hambatan serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, artinya dari lima belas sub kegiatan yg ada bisa diselesaikan sesuai dengan perencanaan dan target yang ditetapkan namun untuk penyerapan anggaran dapat ditinjau lagi ditahun mendatang agar anggaran yang sudah dianggarkan tersebut dapat terserap 100% sesuai dengan kebutuhan yang ada.

6. Rekomendasi Tindak Lanjut Subbagian Program dan Keuangan

Tidak ada kendala dan hambatan serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, artinya dari enam sub kegiatan yg ada bisa diselesaikan sesuai dengan perencanaan dan target yang ditetapkan namun untuk penyerapan anggaran dapat ditinjau lagi ditahun mendatang agar anggaran yang sudah dianggarkan tersebut dapat terserap 100% sesuai dengan kebutuhan yang ada.

I. Penutup

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal pada Kantor Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu ini dibuat sebagai bentuk upaya penjaminan mutu terhadap program kerja yang dilakukan oleh organisasi secara berkesinambungan dan berkelanjutan dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, tepat sasaran, bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan.

J. Dokumen Pendukung

Adapun dokumen-dokumen pendukung dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal Kantor Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada lampiran dalam laporan ini. Adapun dokumen pendukung antara lain:

1. Undangan Rapat (dilampirkan);

 **PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**
KECAMATAN BATANG LUPAR
Jalan Panglima Ngumbang No.01 Lanjak, Kode Pos 78766

Lanjak, 24 Januari 2022

Nomor : 005 / 12 / K.BTR / Sekc.
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan IV tahun 2021.

Kepada,
Yth. 1. Sekcam
2. Kasi dan Kasubbag
3. Staf Kantor Kecamatan Batang Lupar
di - Tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 068 / 29 / SETDA / ORG tanggal 06 Januari 2022 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, untuk itu akan dilaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan IV tahun 2021 pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 25 Januari 2022
Jam : 09.00 Wib
Tempat : Aula Kantor Kecamatan Batang Lupar

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **CAMAT BATANG LUPAR,**
Drs. ABANG EDI SUPARMAN, M. M.
Pembina Tk. I
NIP. 19711028 199203 1 009

2. Daftar hadir (dilampirkan);

DAFTAR HADIR
RAPAT EVALUASI KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2021
DI AULA KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR

Hari / Tanggal : Selasa, 25 Januari 2022

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Drs. ABANG EDI SUPARMAN, M. M.	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Camat	Lanjak	1.
2	ABDUL GANY RASYID, S. PI	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Sekcam	Lanjak	2.
3	AHMAD AMRI	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Kasi Pem	Lanjak	3.
4	BADU ISKANDAR	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Kasi Ekbang	Lanjak	4.
5	ARDI SAMSUL	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Kasi Trantib	Lanjak	5.
6	AKHMADDAR	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Kasi Kesra	Lanjak	6.
7	KUDEWIATI	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Kasubbag Umum dan Aparatur	Lanjak	7.
8	SUTARTO	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Kasubbag Program dan Keuangan	Lanjak	8.
9	ALBERTUS BERLIAN, S. T	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Lanjak	9.
10	HENDRI JONATHAN, S. E	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Lanjak	10.
11	BELYAMIN R	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Petugas Keamanan	Lanjak	11.
12	RICARDUS MARONG PASSA, S. Ak	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Analisis Pembangunan	Lanjak	12.
13	ROSITA SINOM RAHAYU, S. Ak	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Analisis Kesejahteraan Rakyat	Lanjak	13.
14	GIDEON. G	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Pengadministrasi Umum	Lanjak	14.
15	A. T. JANTING	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Pengadministrasi Umum	Lanjak	15.
16	ANTONIUS RIMAU	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Pengadministrasi Keuangan	Lanjak	16.
17	DONITIUS	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Pengadministrasi Umum	Lanjak	17.
18	JONATAN JONI	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Pengadministrasi Kependudukan	Lanjak	18.
19	AGUSTINUS EMPAYA	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Pengadministrasi Pemerintahan	Lanjak	19.
20	MASLAN DANA	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Pengadministrasi Umum	Lanjak	20.
21	ANUAR FEBRI, A Md	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Staf Kasubbag Umum dan Aparatur	Lanjak	21.
22	AGUSTINA	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Staf Kasi Pem	Lanjak	22.
23	NELVI	Kantor Kecamatan Batang Lupar	CS	Lanjak	23.
24					24.
25					25.

3. Notulen rapat (dilampirkan);

NOTULEN RAPAT

“EVALUASI KINERJA KECAMATAN BATANG LUPAR”

TAHUN 2021

Hari, tanggal	: Selasa, 25 Januari 2022
Waktu	: 09.00 WIB s.d selesai
Tempat	: Aula Kantor Kecamatan Batang Lupar
Pimpinan Rapat	: Camat Batang Lupar
Moderator	: Sekretaris Kecamatan
Peserta	: Seluruh Kasi, Kasubbag dan Staf Kecamatan Batang Lupar
Notulen	: Rosita Sinom Rahayu, S.Ak
Perihal	: Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2021

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja sebagai berikut :

1. Kehadiran Peserta

Evaluasi Kinerja 2021 dihadiri oleh Kasi, Kasubbag dan Staf Kecamatan Batang Lupar.

2. Uraian pelaksanaan rapat

a. Evaluasi Kinerja 2021 di buka oleh Bapak Camat Batang Lupar

Evaluasi Kinerja pada hari ini untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja seluruh kasi, kasubbag serta staf Kecamatan Batang Lupar Tahun Anggaran 2021, juga menjadi acuan dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022. Jenis Pelayanan Kecamatan.

b. Laporan dari masing-masing Kasi dan Kasubbag

1. Kasubbag Umum dan Aparatur

Lima dari Enam Realisasi Kegiatan tercapai 100% hanya terdapat 1 kegiatan yang tercapai 66,67% yaitu kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah karena beberapa target yang tidak bisa terealisasi. Sedangkan untuk realisasi anggarannya, 2 dari kegiatan terealisasi 100%. Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

hanya terdapat 1 kegiatan yang tercapai 66,67% yaitu kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah karena beberapa target yang tidak bisa terealisasi. Sedangkan untuk realisasi anggarannya, 2 dari kegiatan terealisasi 100%. Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi 95,67%, dan untuk kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terealisasi 85,55% serta kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terealisasi 92,81%.

1. Kasubbag Program dan Keuangan
Realisasi kegiatan tercapai 100% sedangkan realisasi anggaran tercapai 100%.
 2. Kasi Pemerintahan
Realisasi kegiatan tercapai 100% sedangkan realisasi anggaran tercapai 100%.
 3. Kasi Perekonomian dan Pembangunan
Realisasi kegiatan tercapai 100% sedangkan realisasi anggaran tercapai 96,62%.
 4. Kasi Kesejahteraan Rakyat
Realisasi kegiatan tercapai 100% sedangkan realisasi anggaran tercapai 100%.
 5. Kasi Trantib
Realisasi kegiatan tercapai 100% sedangkan realisasi anggaran tercapai 100%.
- a. Laporan terkait Indikator Kinerja Utama (IKU)
1. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**
Terhadap pelayanan aparatur dengan menggunakan kuisioner yang dibagikan kepada 150 orang dibagi 10 desa yang ada di kecamatan Batang Lupar, dari target Score yang ditetapkan 100 ternyata tidak terealisasi sepenuhnya hanya 73,85 saja score yang tercapai, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :
 - Pada tahun 2012-2019 Kantor Camat Batang Lupar masih melayani KTP-e, sedangkan mulai tahun 2020 sampai sekarang tidak melayani KTP-e dikarenakan alat untuk merekam KTP-e rusak, sehingga masyarakat harus ke kabupaten.
 - Dalam pelayanan pembuatan KK baru, penggantian KK tidak semuanya selesai tepat waktu dikarenakan beberapa hal, seperti: gangguan jaringan, kerusakan genset, dan kesalahan teknis penginputan data.
 2. **Persentase keluhan / pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindak lanjuti**
Untuk capaian kinerja indikator Persentase keluhan / pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindak lanjuti sudah sesuai target yang ditentukan yaitu 100% dan terealisasi 100% (sesuai data pada pengukuran kinerja kasi trantib)

3. Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan

Untuk capaian kinerja dalam indikator Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan, petugas atau aparatur langsung merespon dan menyelesaikan persoalan masyarakat saat itu juga.

4. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

Untuk capaian kinerja dalam indikator Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dari target yang ditetapkan 100% ternyata tidak terrealisasi semuanya dikarenakan dari 6 sarana dan prasarana kantor yang dianggarkan ada 2 unit yang tidak terealisasi dikarenakan harga barang melebihi dari anggaran yang ditetapkan.

5. Persentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan

Untuk capaian kinerja dalam indikator Persentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan sudah sesuai dengan target yang ditentukan.

6. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu

Untuk capaian kinerja dalam indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu dari target yang ditetapkan 75% terealisasi 89,47%, berarti sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 119,29%.

7. Persentase pelayanan administrasi umum dilaksanakan tepat waktu

Untuk capaian kinerja dalam indikator Persentase pelayanan administrasi umum dilaksanakan tepat waktu, dari target yang ditetapkan 100% dapat terelisasi semuanya sesuai dengan target yang ditetapkan.

8. Persentase Laporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tepat Waktu

Untuk capaian kinerja dalam indikator Persentase Laporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tepat Waktu yang ditetapkan 100% terealisasi 100%.

9. Persentase pengurus PKK yang aktif

Untuk capaian kinerja dalam indikator Persentase pengurus PKK yang aktif, dari target yang ditetapkan 100% terealisasi 100% dikarenakan organisasi PPK dari tingkat pedesaan (10 desa) sampai tingkat kecamatan semuanya aktif.

10. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindak lanjuti

Untuk capaian kinerja dalam indikator indikator Persentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindak lanjuti disesuaikan dengan desakan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang memerintahkan Pemerintahan Kecamatan untuk menindaklanjuti semua temuan BPK terutama dalam mendata Aset Tanah dan Bangunan yang ada di kecamatan.

Diharapkan Capaian Kinerja tersebut tetap dapat dipertahankan ataupun ditingkatkan lagi pada Tahun Anggaran 2022 sehingga kinerja yang pada Kantor Kecamatan Batang Lupar dapat lebih baik lagi dan lebih ditingkatkan lagi.

Dokumentasi kegiatan (dilampirkan);

